

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

¹Stepanus Pati Bulu, ² Yayuk Ngesti Rahayu, ³ Nova Dwi Hernanik

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wisnuwardhana Malang
Email:stepanus.bulu123@gmail.com.

Abstract: *The purpose of this study was to determine (X1) Understanding of Tax Regulations, (X2) Quality Fiscal Services and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance Case Study on Students of East Nusa Tenggara Wisnuwardhana University Malang. In this study using saturated sampling, which is a sampling technique when all members of the population are used as samples. The data used in this study is primary data from the results of distributing questionnaires. The test method uses Validity, Reliability and Multiple Linear Regression Analysis with the SPSS for Windows version 21 program. From the results of the study it was found that the variables of understanding of taxation regulations, quality of tax service services and tax sanctions on taxpayers significantly influenced taxpayer compliance. While the variable understanding of tax regulations and tax sanctions is not significant to the compliance of motorized vehicle taxpayers. With the results of this study, it is hoped that the students of East Nusa Tenggara, Wisnuwardhana University, Malang, can improve the quality of tax service services to pay taxes so as to increase taxpayer compliance.*

Keyword: *Understanding of tax regulations, quality of tax service services, tax sanctions, and motor vehicle taxpayer compliance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (X1) Pemahaman Peraturan Perpajakan, (X2) Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Pada Mahasiswa Nusa Tenggara Timur Universitas Wisnuwardhana Malang. Dalam penelitian ini menggunakan *sampling Jenuh* yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner. Metode pengujian menggunakan Uji Validitas, Reliabilitas dan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program *SPSS for Windows versi 21*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa Nusa Tenggara Timur Universitas Wisnuwardhana Malang dapat meningkatkan kualitas pelayanan fiskus untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak dibedakan menjadi empat fungsi yaitu (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain

sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. (3) Fungsi stabilitas yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. (4) Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008: 3).

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo & Ilyas, 2002:11).

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak - pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi Pajak Propinsi, Pajak Kabupaten/Kota.

METODE

Penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat diukur dan dikonversikan terlebih dahulu kedalam bentuk angka dan diolah dengan menggunakan metode statistik SPSS 21.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Nusa Tenggara Timur semester II sampai dengan semester VIII yang masih aktif kuliah dan mempunyai kendaraan bermotor sendiri di Universitas Wisnuwardhana Malang. Pemilihan kampus Wisnuwardhana sebagai objek penelitian didasarkan pada peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan mahasiswa membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik penentuan sampel dalam hal ini adalah dengan menggunakan metode *sampling Jenuh*, yaitu *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:96). Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel, jumlah sampelnya 51 mahasiswa.

Dalam pemilihan sampel peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan, seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tersebut berada di lokasi pengambilan sampel atau kebetulan mengenal orang tersebut.

1. Mahasiswa yang mempunyai kendaraan bermotor sendiri karena pada saat pelaporan dikantor samsat harus orang yang mempunyai kendaraan sendiri yang tertera di STNK nama pemilik kendaraan sehingga saya memilih mahasiswa yang mempunyai kendaraan sendiri.
2. Mahasiswa khusus Nusa Tenggara Timur karena mahasiswa Nusa Tenggara Timur di Universitas Wisnuwardhana Malang pada umum tinggal dikos – kosan dan banyak sekali membuat uang sehingga saya ingin melakukan penelitian apakah mahasiswa Nusa Tenggara Timur membayar pajak kendaraan bermotor.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Survei dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi obyek penelitian untuk mendapatkan data primer. Pengumpulan data dengan menggunakan *servey method* data yang digunakan dalam penelitian diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh secara parsial (uji t) terlihat bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,493$ dan nilai t_{tabel} sebesar 2,010. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis secara parsial maka H_0 diterima, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,493 > 2,010$. Hal ini berarti pemahaman peraturan perpajakan tidak signifikan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Nusa Tenggara Timur Universitas Wisnuwardhana Malang.

Hasil pengujian yang diperoleh secara parsial (uji t) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan fiskus (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,081 dan nilai signifikansi sebesar 0,437. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan fiskus akan manfaat dari membayar pajak maka akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan dengan penilaian positif mahasiswa bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak untuk terciptanya kesejahteraan bagi diri sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Dengan memiliki pemikiran tersebut dapat menciptakan tingginya tingkat kualitas pelayanan fiskus, maka pemahaman peraturan perpajakan dan pelaksanaan kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil pengujian yang diperoleh secara parsial (uji t) terlihat bahwa kualitas pelayanan fiskus (X_2) berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu nilai koefisien regresi t_{hitung} sebesar 2,081 nilai t_{tabel} 2,010 dan nilai signifikansi sebesar 0,437. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih kurang sehingga perlu adanya sosialisasi dari pihak samsat mengenai kualitas

pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil pengujian yang diperoleh secara parsial (uji t) terlihat bahwa sanksi perpajakan (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu nilai koefisien regresi t_{hitung} sebesar 784 nilai t_{tabel} 2,010 dan nilai signifikansi sebesar 0,437. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mahasiswa membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang sehingga

perlu adanya sosialisasi dari pihak samsat mengenai sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Nusa Tenggara Timur Universitas Wisnuwardhana Malang.
2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa Nusa Tenggara Timur Universitas Wisnuwardhana Malang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa Nusa Tenggara Timur Universitas Wisnuwardhana Malang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor dengan Moderating Preferensi Risiko*. Accounting Analysis Journal Vol.3, No.4. Agustus. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Ahmad Tjahyono, dan Muhammad Fakhri Husein. (2000). *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Alam, Sahrul. 2003. “*Pengaruh Tingkat Pengetahuan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus mahasiswa nusa tenggara timur (NTT)*”), Tesis S1 Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Arum, Harjanti Puspa 2012, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di WilayahKPP Pratama Cialacap)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ardyanto, Arif Angga dan Utaminingsih, Nanik Sri. 2014. *Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Accounting Analysis Journal Vol.3, No.2.Januari.Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Boediono, B. 2003. “*Pelayanan Prima Perpajakan*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.Direktorat Jenderal Pajak 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Ghozali, Imam. 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gede Putu Pranadata. (2014). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (Vol 2, No. 2: Semester Genap 2013/2014). Hlm. 1-16. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Indriantoro, nurdan Supomo, bambang (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Jatmiko, Agus. Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kendaraan bermotor* Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Julianti, Murni. 2014. *Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Kartika dan Suntono. (2015). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Demak)”. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol. 4, No. 1.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang “Kriteria Wajib Pajak”.
- Kesuma. (2016). “Pengampunan Pajak Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak”. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Volume 12, (2), 2016.
- Kusuma. (2016). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)”. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Leba. (2016). “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktoral Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). “Pengaruh Sunset Policy, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. *Jurnal Akuntansi*/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

- Nugroho. (2006). *“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening”*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nur Indriatono dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE
- Pandiangan, Liberty. *“Puaskah Anda Dengan Pelayanan Pajak,”* Artikel ini diakses pada tanggal 12 November 2016, dari <http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/berita>
- Pranadata, 2014. *“Pengaruh pemahaman wajib pajak ,Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu”*. Universitas Brawijaya Malang, Malang.
- Ramadiansyah, Dimas., Sudjana, Nengah., Dwiatmanto. 2014. *“Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari”*. Jurnal e-Perpajakan, No.1 volume 1. Universitas Brawijaya. Malang.
- Resmi, Siti 2009, *Perpajakan:Teori dan Kasus Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rochmat Soemitro. 2010. *“Asas Dan Dasar Perpajakan (1) (Edisi Revisi)”*.Refika Aditama
- Safri Nurmantu. 2005. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Safri. (2013). *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Yogyakarta)”*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Sardana. 2014. *“Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*. Bandung: Alfabeta.
- Shanti. (2016). *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wirausahawan Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Gianyar”*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Supadmi, Ni Luh. 2010. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Akuntansi Pajak.
- Syahril. (2013). *“Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok)”*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Syamsudin, Marta. 2014. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Stikubank.

Widayati dan Nurlis. 2010. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto. www.pajak.go.id

Yulianti. (2015). “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada WPOP KPP Pratama Makassar Utara)*”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.